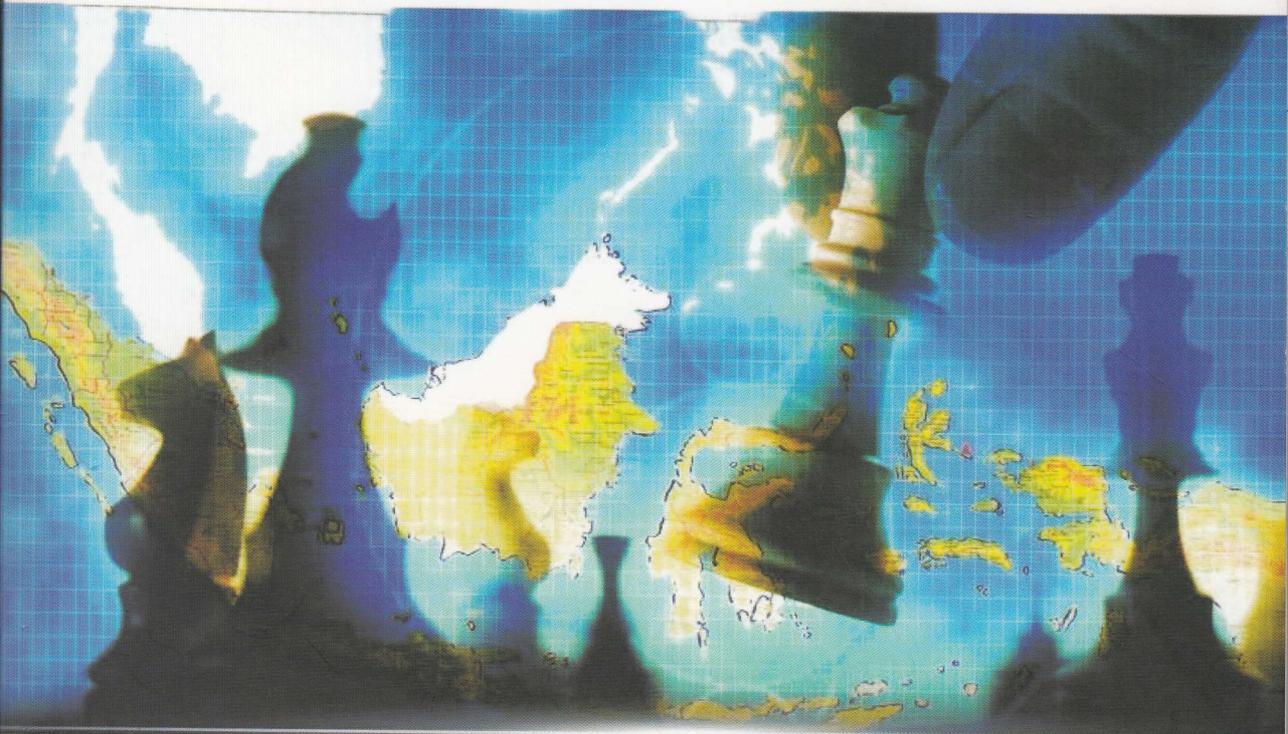


**Dr. Eko Harry Susanto**

# **KOMUNIKASI POLITIK DAN OTONOMI DAERAH**

**TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA POLITIK  
DAN PEMBANGUNAN**



**Editor :**

**1. Dr. Andy Corry Wardhani**

**2. Drs. Widayatmoko, MM.**



**Edisi Asli**

**Hak Cipta ©2009, Penerbit Mitra Wacana Media**

Telp. : (021) 824-31931

Faks. : (021) 824-31931

Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>

E-mail : [mitrawacanamedia@gmail.com](mailto:mitrawacanamedia@gmail.com)

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

### **UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

**Dr. Eko Harry Susanto**

**Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah**

**Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan**

Edisi Pertama

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009

1 jil., 17 x 24 cm, hal. 172

ISBN: 978-602-8495-26-4

1. Politik

2. Judul

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 Komunikasi Politik dan Pembangunan Daerah .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Dinamika Komunikasi Politik .....	2
C. Pembangunan, Modernisasi dan Media Massa .....	5
D. Peran Media Massa .....	7
E. Agen Pembaharuan .....	11
F. Eksistensi Komunikasi Politik dalam Pembangunan .....	13
G. Penutup.....	14
<b>BAB 2 Teknologi Komunikasi dan Otonomi Daerah .....</b>	<b>17</b>
A. Eksistensi Teknologi Komunikasi .....	18
B. Dinamika Otonomi Daerah .....	19
<b>BAB 3 Reformasi Birokrasi dan Teknologi Komunikasi .....</b>	<b>27</b>
A. Substansi Birokrasi .....	28
B. Karakter Budaya Paternalistik .....	32
C. Kepemimpinan Birokrasi .....	35
<b>BAB 4 Dinamika Pilkada dan Calon Independen .....</b>	<b>39</b>
A. Kompleksitas Peran Calon Independen .....	43
B. Kepemimpinan Jalur Akademis .....	45
C. Eksistensi Tokoh Muda .....	46
D. Karakteristik Komunikator Politik .....	47

<b>BAB 5</b>	<b>Polling dan Kampanye Terselubung Dalam Pilkada .....</b>	<b>51</b>
	A. Kredibilitas Lembaga Polling .....	52
	B. Pengaruh Polling Terhadap Konstituen .....	56
<b>BAB 6</b>	<b>Politik Pencitraan Mempengaruhi Konstituen .....</b>	<b>63</b>
	A. Siklus Hidup Partai Politik .....	65
	B. Golput dan Eksistensi Konstituen .....	68
	C. Kritik Partai Oposisi : Upaya Pencitraan .....	72
<b>BAB 7</b>	<b>Pemekaran Wilayah :Perspektif Komunikasi Antar Budaya</b>	<b>77</b>
	A. Mengabaikan Keanekaragaman .....	79
	B. Meminimalisir Pemekaran Wilayah .....	81
	C. Penghapusan Daerah Otonomi .....	83
<b>BAB 8</b>	<b>Internet dan Harga Gabah .....</b>	<b>85</b>
	A. Ironi Teknologi .....	85
	B. Menarik Simpati Petani .....	86
<b>BAB 9</b>	<b>Komunikasi Politik dan Demokrasi Lokal .....</b>	<b>89</b>
	A. Tuntutan Perangkat Desa .....	89
	B. Eksistensi Lembaga Desa .....	90
	C. Politisasi Birokratisasi Pedesaan .....	92
<b>BAB 10</b>	<b>Revitalisasi Pertanian dan Transparansi Informasi .....</b>	<b>97</b>
	A. Penguatan Basis Pertanian .....	97
	B. Transparansi dan Kredibilitas Sumber Informasi .....	99
<b>BAB 11</b>	<b>ExxonMobil dan Pemuka Pendapat Lokal .....</b>	<b>103</b>
	A. Industri di Pedesaan dan Karakter Agraris .....	103
	B. Perhatian Terhadap Masyarakat Setempat .....	104
<b>BAB 12</b>	<b>Rating TV dan Khalayak di Daerah.....</b>	<b>107</b>
	A. Kekuatan Media .....	108
	B. Tayangan Bermutu .....	109

<b>BAB 13 Komunikasi, Petani dan Perubahan Sosial.....</b>	<b>113</b>
A. Problem Komunikasi .....	113
B. Implikasi Perubahan Sosial .....	116
<b>BAB 14 Ketimpangan Informasi dan Sosiokultural Petani .....</b>	<b>117</b>
A. Kemiskinan dan Ketimpangan Informasi .....	117
B. Ketergantungan Terhadap Kekuasaan Negara .....	118
<b>BAB 15 Waktu Siklus Versus Budaya Komersial .....</b>	<b>121</b>
A. Pola Kerja Waktu Diakronik .....	122
B. Keterbatasan Teknologi Komunikasi .....	124
<b>BAB 16 Lembaga Tradisional dan Legalitas Kekuasaan.....</b>	<b>125</b>
A. Upaya Mengontrol Petani .....	125
B. Ketergantungan Informasi .....	126
<b>BAB 17 Industrialisasi dan Pembangunan Desa .....</b>	<b>129</b>
<b>BAB 18 Pasang Surut Kehidupan Petani .....</b>	<b>133</b>
A. Kepemilikan Tanah .....	133
B. Basis Politik .....	135
<b>BAB 19 Interaksi dan Komunikasi Pedesaan : Sebuah Laporan .....</b>	<b>137</b>
A. Pendahuluan .....	137
B. Konsep – Konsep Universal .....	138
C. Tinjauan Geografis .....	140
D. Ikatan Historis Petani .....	141
E. Sistem Hubungan Kerja .....	142
1. Pola Petani Dalam Mengerjakan Sawah.....	142
2. Teknologi, Produktivitas dan Pemilikan Modal .....	145
F. Lembaga-lembaga Pertanian dan Pengaruh Budaya Lain .....	146
1. Eksistensi Lembaga Pertanian .....	146
2. Pengaruh Industri Terhadap Kultur Petani Klari .....	147
G. Media Komunikasi .....	150
H. Penutup .....	151

Daftar Pustaka ..... 153  
Biodata Penulis ..... 161

## Daftar Tabel

Tabel 1 Hasil Polling Bulan September 2008 ..... 53  
Tabel 2 Hasil Polling Popularitas 4 Capres di Th. 2008 ..... 54  
Tabel 3 Hasil Polling (%) Popularitas Presiden Desember 2008 ..... 54  
Tabel 4 Popularitas Kandidat dari Partai Politik ..... 54  
Tabel 5 Hasil Polling Popularitas Partai Politik Th. 2008 ..... 55  
Tabel 6 Hasil Polling Popularitas Partai Politik Desember 2008 ..... 55  
Tabel 7 Pertimbangan Dalam Memilih Parpol pada Pemilu 2004 dan 2008 ..... 57  
Tabel 8 Jumlah Golput dalam Pilkada di Pulau Jawa ..... 71  
Tabel 9 Banyaknya Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Kawasan ..... 134

# Bab 1

## Komunikasi Politik dan Pembangunan Daerah

### A. Pendahuluan

Komunikasi politik merupakan faktor yang esensial sebagai salah satu pendukung pembangunan. Semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan elite lainnya dalam kekuasaan negara, tidak bisa lepas dari komunikasi politik. Namun yang menjadi persoalan, tidak semua individu, kelompok ataupun entitas lain dalam kehidupan bernegara peduli terhadap pola komunikasi yang dilakukan di suatu komunitas. Terlebih lagi di lingkungan warga pedesaan, secara historis pola komunikasi politik yang sering dilakukan oleh para elite berkuasa, justru bersifat koersif. Akibatnya, ada jarak yang menganga antara para pembuat kebijakan dengan masyarakat pedesaan. Satu sisi memaksakan kehendaknya, di pihak lain terperangkap dalam jerat ketidakberdayaan untuk melakukan penolakan terhadap jargon pembangunan yang serba memaksa.

Namun situasi tersebut, secara umum telah berubah, setidak – tidaknya ketika gelombang demokratisasi di seluruh dunia itu bergaung, maka pola komunikasi yang koersifpun semakin berkurang. Namun disisi lain, seolah – olah membicarakan masalah partisipasi pembangunan masyarakat desa, sepertinya sudah tidak relevan. Padahal, pembangunan pedesaan dengan segala kompleksitasnya tetap penting untuk dieksplorasi. Sebab demokratisasi dalam kehidupan bernegara menghasilkan beragam pola komunikasi yang tidak merujuk kepada satu titik atau pusat kekuasaan, tetapi setiap kelompok memiliki rujukan yang berbeda – beda dalam memaknai pembangunan pedesaan.

Secara esensial menelaah pembangunan akan menghadapi berbagai persoalan yang sangat beragam, dari masalah sosial, ekonomi, politik dan sejumlah alasan lain yang terkait dengan perubahan dan dinamika teknologi komunikasi yang demikian pesat. Pembangunan pedesaan juga sering dikaitkan dengan upaya memodernisasikan pedesaan. Dalam konteks ini, para komunikator yang mempunyai kekuasaan politik, agen pembaharuan, agen kekuasaan negara, pemilik modal ataupun para pemuka pendapat sering terlibat persoalan yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan. Secara faktual, mengupas persoalan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang dikaitkan dengan peran dari komunikasi politik tetap relevan.

## Bab 2

# Teknologi Komunikasi dan Otonomi Daerah

**P**erkembangan teknologi secara universal mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia seperti perubahan, konflik maupun integrasi. Bersinggungan dengan teknologi Rogers dan Schoemaker (1983 : 14) menyatakan, bahwa “kemajuan teknologi dan transportasi telah mendorong mobilitas yang tidak terikat jarak dan waktu”. Pendapat lain dari lingkup komunikasi banyak disebut – sebut bahwa, “teknologi komunikasi juga telah menyatukan kelompok yang berbeda pandangan, politik, sistem sosial dan kepercayaan yang membawa bangsa – bangsa dalam orde bangsa global” (Croteu dan Hoynes, 2002).

Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi komunikasi ke dalam posisi yang amat strategis, karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, waktu serta hambatan lain dalam komunikasi konvensional, yang dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Menurut Tubbs dan Moss (2005), “Teknologi Komunikasi merupakan alat/sarana/cara untuk mempercepat, mempermudah proses penyampaian pesan”. Teknologi komunikasi jika dimanfaatkan dengan baik, dapat berpengaruh positif dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Sebab tidak dapat diabaikan, teknologi komunikasi juga memberikan peluang terjadinya dampak negatif yang tidak akan meningkatkan kinerja organisasi, tetapi justru merusak tatanan yang sudah ada.

Namun, dalam konteks penyelenggaraan Otonomi Daerah, tentu saja yang diharapkan adalah manfaat positif yang bisa meningkatkan kinerja daerah, sebab hakikatnya, teknologi komunikasi mampu mengubah cara untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali dan menyebarkan informasi atau data kepada masyarakatnya. “Teknologi baru boleh dikatakan menimbulkan revolusi komunikasi di berbagai penjuru dunia”.(Kahan, 2002). Dalam pandangan Wood dan Smith (2005), penggunaan teknologi untuk mendukung komunikasi merupakan jalan baru yang mendukung relasi individu di masyarakat dengan lingkungan regional maupun global. Pernyataan tersebut secara substansial didukung pula oleh Naisbitt (1994:99) yang menyebutkan, “teknologi berkembang dengan kecepatan yang semakin meningkat, teknologi baru menambah kecepatan dan kemampuan teknologi yang sudah ada sebelumnya, yang mampu menghubungkan berbagai entitas masyarakat di dunia yang secara kultural berbeda”.

## Bab 3

# Reformasi Birokrasi dan Teknologi Komunikasi

Untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi diperlukan kepemimpinan birokrasi yang mampu menangani program pemerintah lebih baik. Sejumlah elite politik dan pemerintah sudah terlampau sering berpidato ataupun menyuarakan pendapatnya tentang perlunya pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintahan di daerah, yang dinilai belum berhasil memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pimpinan dilingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan reformasi birokrasi, pada berbagai kesempatan, mengakui bahwa kepemimpinan birokrasi belum mampu menangani program pemerintah lebih baik. (Kompas, 9 Desember 2006). Sebuah pernyataan klise yang tidak mudah untuk dijalankan oleh pemerintah beserta organ – organ kekuasaannya di daerah yang berniat untuk menciptakan *good governance* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

Meskipun demikian, bukan berarti semua pimpinan di lingkungan pemerintahan daerah di Indonesia tidak bisa melakukan reformasi birokrasi, sebab terdapat sejumlah bupati, walikota dari berbagai daerah di Indonesia dinilai berhasil dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sehingga pelayanan kepada publikpun berjalan dengan baik. Misalnya, Yogyakarta, Surakarta, Jombang, Sragen, Blitar, Tarakan, Luwu Timur, Makassar, Badung dan Kabupaten Gorotalo (Tempo, 28 Desember 2008).

Di wilayah tersebut, reformasi birokrasi menghasilkan kinerja aparat dan lembaga – lembaga pemerintahan di daerah menjadi baik, sehingga pelayanan kepada publikpun dapat dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh di Kabupaten Sragen, semua desa dan Kecamatan di Sragen terhubung dalam jaringan internet. Sragen memiliki 208 desa, dan 20 kecamatan. Setiap desa minimal memiliki dua komputer dan satu laptop. Dengan internet, semua desa itu, bisa memangkas biaya telpon, karena menggunakan *Voice Over Internet Protocol (VoIP)*. Komputer di desa itu terhubung dengan kecamatan, dinas, badan serta kantor bupati. Mereka membangun jaringan intranet yang disebut kantor maya. Jadi setiap kepala desa, dinas, atau badan bisa memberikan laporan harian kepada Bupati atau pejabat lain, tanpa perlu repot mengirim kurir. Rapat dapat

## Bab 4

# Dinamika Pilkada dan Calon Independen

Pemilihan Kepala Daerah di beberapa wilayah bisa diikuti oleh lebih dari sepasang kandidat, namun sebaliknya di wilayah lain, pemilihan kepala daerah hanya ada satu pasangan calon kepala daerah yang umumnya mereka yang masih menjabat atau *incumbent*.

Sebagaimana diketahui, misalnya Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten diikuti oleh lima pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur. Bisa dimaklumi, karena memang terdapat partai atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% jumlah kursi atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD. Sebaliknya Propinsi Gorontalo, pada awalnya hanya memiliki satu pasangan calon gubernur *incumbent*. Inipun dapat dipahami mengingat partai Golongan Karya terlalu dominan dalam perolehan suara wilayah itu. Sepintas kelangkaan peserta pilkada memang aneh mengingat orientasi partai politik pencapaian kekuasaan demi untuk mengembangkan pengaruhnya di masyarakat.

Namun terlepas dari kekuatan partai politik di wilayah setempat, apakah kurangnya pasangan kandidat kepala daerah itu dapat pula diasumsikan terjadi krisis kepemimpinan, sedangkan munculnya banyak calon dapat diidentikkan dengan berkembangnya kepedulian elite terhadap kepemimpinan di daerah, sepertinya harus dikaji lebih komprehensif dalam wacana strategi partai politik yang ada di wilayah tersebut. Sebab, kecenderungan munculnya calon tunggal dari kepala daerah yang masih menjabat (*incumbent*), sepertinya sengaja dibiarkan oleh partai politik pesaingnya demi untuk memangkas pengaruhnya di masyarakat. Harus diakui bahwa di berbagai daerah, bersaing dengan kepala daerah yang sedang menjabat sangat sulit, mengingat mereka umumnya masih menguasai sumber daya dan dana pemerintahan di daerah yang dapat digunakan secara terselubung mendukung kampanye atau menggalang kekuatan politik demi kepentingan keberlangsungan kekuasaannya.

Di sisi lain jika tidak kunjung muncul dua pasang kandidat kepala daerah, maka jabatan kepala daerah yang berkuasa mungkin saja habis, sehingga kampanye terselubung dalam berbagai pertemuan yang dikemas dalam kegiatan kepala daerah yang seolah peduli terhadap rakyatnya, sulit untuk dilaksanakan. Kondisi seperti ini,

## Bab 5

# Poling dan Kampanye Terselubung dalam Pilkada

Sejalan dengan kebebasan informasi, salah satu fenomena yang menonjol dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung adalah keterlibatan berbagai lembaga penyelenggara polling yang menyemarakkan dinamika politik lokal dengan memaparkan serangkaian prediksi perolehan suara kandidat kepala daerah melalui media massa.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung, sudah dilaksanakan sejak tahun 2006, merupakan agenda politik yang ditunggu - tunggu oleh konstituen, kandidat kepala daerah serta elite politik di tingkat lokal maupun pusat yang bernafsu memenangi kompetisi pilkada. Situasi politik di daerah menjelang pilkada, sudah lazim jika diwarnai dengan beragam perilaku partai politik untuk mencari dukungan dari masyarakat.

Mengingat sedemikian pentingnya pelaksanaan pilkada bagi partai politik yang berupaya mendudukkan calonnya sebagai kepala daerah, maka tidak aneh jika tindakan yang dilakukan untuk menggalang konstituen sering tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku dalam pemungutan suara. Sejak dari tahap persiapan yang tidak berjalan mulus sampai tahap terpilih ataupun dilantiknya kepala daerah, sarat dengan berbagai masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Persoalan yang biasa muncul dan terkait dengan perilaku partai politik yang melanggar ketentuan adalah ketika pilkada memasuki tahap kampanye.

Secara substansial kampanye menyangkut pengarahannya, pemerkuatan dan menggerakkan kecenderungan konstituen untuk memilih kandidat yang dikehendaki dalam pemungutan suara. Kampanye juga masuk dalam kajian Komunikasi Politik. Sebab batasan komunikasi politik dalam arti sempit adalah Setiap jenis penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dalam bentuk kata-kata terucap, atau dalam bentuk isyarat yang dapat mempengaruhi secara langsung kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan dalam suatu sistem disebut komunikasi politik.

Sedangkan dalam arti luas, menurut Harsono Suwardi (1995 : 23), adalah, "setiap jenis penyampaian pesan-pesan politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima,

## Bab 6

# Politik Pencitraan Mempengaruhi Konstituen

**B**encana alam dan peristiwa – peristiwa lain yang kurang menguntungkan bagi sejumlah masyarakat, di berbagai daerah cenderung dijadikan ajang untuk mencari simpati oleh partai politik. Institusi yang diandalkan untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu, berlomba – lomba memberikan bantuan kepada para korban banjir di sejumlah kawasan kumuh, sembari terus mengklaim bahwa partainya selalu berpihak kepada rakyat.

Pemandangan di layar kaca, atau berita di media cetak dari sejumlah daerah, yang terkena musibah, tampak dimanfaatkan untuk kampanye dalam kompetisi politik di tingkat lokal maupun nasional. Hampir semua partai politik, termasuk partai baru peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, tidak ketinggalan ikut menebar bendera diberbagai kawasan yang dilanda kesusahan. Posko partai politik benar – benar mendominasi kawasan bencana, dan ini merupakan atraksi politik yang bermakna “sambil menyelam minum air”, membantu para korban dan berharap memperoleh suara yang meningkat pada pemilihan umum maupun kompetisi politik lain di tingkat lokal.

Menurut Miriam Budiardjo (1995 : 200), Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota – anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai, serta cita – cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan – kebijakan mereka. Sebagai kelompok yang terorganisir, aksi partai politik, diseputar bencana banjir, tentu sah – sah saja, karena memang menguntungkan ataupun membawa manfaat bagi para korban banjir.

Tetapi dipihak lain, perlukah menonjolkan atribut partai di sela kesusahan masyarakat, mengingat partai politik sesungguhnya sebagai sarana untuk menciptakan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, maka ketelibatannya dalam membantu bencana banjir sudah sewajarnya dilakukan. Sepertinya, upaya mengeksplorasi simbol politik di kawasan bencana, bisa bermakna menomorduakan sisi lain yang lebih terkait dengan kebutuhan sesungguhnya dari mereka yang terkena musibah. Sebab, ada kecenderungan, yang menonjol adalah

## Bab 7

# Pemekaran Wilayah : Perspektif Komunikasi Antar Budaya

Ditengah keraguan terhadap otonomi daerah yang tidak bisa memberikan pelayanan publik lebih baik, sampai dengan akhir tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat masih menyetujui sejumlah Rancangan Undang – Undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru dari berbagai wilayah di Indonesia.

Padahal, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007, sudah menetapkan persyaratan “lebih ketat” dalam pemekaran wilayah. Pembentukan daerah otonomi baru harus sesuai aspirasi badan permusyawaratan desa/ forum komunikasi kelurahan dan diperlukan keputusan berjenjang dari lembaga eksekutif ataupun legislatif untuk menetapkan pemekaran wilayah. Mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri, bahwa Pemekaran wilayah dibenarkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Namun pertanyaan yang segera muncul adalah, apakah setiap peluang yang ada harus dimanfaatkan. Sebab kelayakan politik dan ekonomi harus benar – benar diperhatikan, jadi pemerintah daerah harus memberikan saran konkret tentang masalah ini. (Kompas, 5 September 2007)

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, syarat administratif untuk pembentukan provinsi baru, meliputi adanya persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri dalam Negeri. Untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/ Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi menteri dalam Negeri.

Sedangkan syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sementara itu, syarat fisik, meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Mengingat persyaratan tersebut dinilai tidak mampu untuk menghambat semangat pembentukan daerah otonomi baru, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, yang lebih ketat. Dalam syarat teknis ditegaskan, bahwa untuk meluluskan

## Bab 8

# Internet dan Harga Gabah

Krisis pangan masih berpotensi mengancam, harga beras naik, tetapi gabah di petani tidak menikmati perubahan harga jual berarti. Sejumlah pihak yang bertanggungjawab terhadap masalah beras dan petanipun sepertinya tidak mau disalahkan.

Keterpurukan harga gabah, diperparah lagi oleh institusi yang bertanggungjawab terhadap masalah perberasan, seperti Bulog disinyalir lebih suka membeli gabah dari tengkulak dan pengusaha penggilingan (Kompas, 10 Maret 2007). Dua entitas yang kesohor di lingkungan petani desa ini sepertinya bisa seenak sendiri menetapkan harga gabah petani, dengan aneka dalih yang berkenaan dengan mutu, seperti persentase kadar air, kadar hampa gabah dan sejumlah alasan lain yang membuat petani tidak berkutik. Petani menurut pada pendapat tengkulak, sebab mereka umumnya tidak memiliki sarana pengukur ataupun untuk mendeteksi kualitas gabah yang memadai.

### A. Ironi Teknologi

Sungguh ironis, alat sederhana itu tidak dimiliki petani. Sedangkan *United Nations Development Program* (UNDP) dan Bappenas, lebih suka membuat telecenter berbasis internet di pedesaan, yang konon untuk meraih pasar lebih luas (Kompas, 26 Desember 2006). Namun sepertinya implikasi teknologi komunikasi yang bisa dirasakan oleh seluruh petani belum tercapai. Sebab, memang internet bukan sebagai sarana yang mudah untuk diakses setiap saat oleh petani di pedesaan. Terlebih lagi sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa penyebaran teknologi di Indonesia tidak merata. Mungkin saja secara fisik ada sarana teknologi, namun tetap saja faktor pendukung untuk mengoperasikan teknologi internet di pedesaan tidak mudah dilakukan.

Karena itu, tanpa mengesampingkan perlunya teknologi, tetapi sesungguhnya J.H. Boeke (1976), sudah mengingatkan bahwa untuk mengajak petani Indonesia bisa beradaptasi dengan perubahan, memerlukan proses panjang, sebab hakikatnya petani desa sulit menerima sistem perekonomian kapitalis yang dinilai mengancam sendi kehidupan masyarakat desa.

Petani bisa hidup lebih baik jika pemerintah menghargai hak sosial – ekonomi yang berkembang di pedesaan. Keterlibatan perangkat atau berbagai lembaga

## Bab 9

# Komunikasi Politik dan Demokrasi Lokal

Sejalan dengan reformasi kenegaraan, dinamika politik di daerah termasuk di pedesaanpun menggeliat dan bersaing dengan hiruk pikuk kehidupan politik nasional. Dalam bingkai kebebasan berpolitik yang menyuarakan pendapat, tampaknya komunikasi politik yang dibangun oleh para aparat pemerintahan desa tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun berbagai tuntutan yang dilontarkan kepada pemerintah, belum bisa dipenuhi, tetapi setidaknya – tidaknya elite partai dan pemerintah, yang terikat dalam kekuasaan negara harus memperhatikan aneka persoalan pedesaan.

### A. Tuntutan Perangkat Desa

Memang sebagian dari tuntutan itu sudah dipenuhi walaupun tetap menimbulkan berbagai persoalan seperti pengangkatan Sekdes menjadi PNS sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 45 Tahun 2007. Namun setidaknya – tidaknya, masih ada tiga persoalan penting yang muncul dalam pemerintahan desa yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan aparat pedesaan. Masalah yang pertama adalah tuntutan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) agar pemerintah menetapkan anggaran yang jelas untuk kesejahteraan desa dan tuntutan agar segera dibuat Undang – Undang tentang Desa, harus menjadi perhatian yang proporsional dari pemerintah khususnya Departemen Dalam Negeri yang terkait langsung dengan regulasi pemerintahan desa.

Tuntutan itu wajar sebab, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di pedesaan. Penghargaan materi secara legal oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menepis munculnya korupsi sistematis yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa. Ketentuan tentang gaji kepada Kepala Desa yang tidak memadai sebelumnya tidak pernah dihiraukan. Sebab pada masa Orde Baru, meski dengan segala keterbatasan formal dari pemerintah, tetapi seorang Kepala Desa mampu hidup berkecukupan dan bukan mustahil menjadi orang paling kaya di desa. Bukan karena umumnya berasal dari elite pedesaan yang menguasai ekonomi, namun pola kekuasaan yang memposisikan kepala desa sebagai organ politik pemerintah, seperti memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mencari penghasilan dari berbagai sumber, yang

## Bab 10

# Revitalisasi Pertanian dan Transparansi Informasi

**D**alam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, tentang perlunya revitalisasi pertanian, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Program yang tepat dalam situasi perekonomian yang menyodorkan kalkulasi keberhasilan namun belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi bagi sebagian warga di desa – desa pertanian, mereka menilai bahwa pergantian demi pergantian dalam pemerintahan belum mampu untuk meningkatkan taraf hidup yang layak sesuai harapan.

Oleh sebab itu, pemerintah dan sejumlah elite politik pendukungnya, mestinya tidak emosional jika menanggapi akumulasi kritik dari berbagai pihak, yang menyoroti tentang kemiskinan di pedesaan. Selain itu, seyogianya juga tidak terlalu gegabah untuk mempertahankan asumsi angka – angka yang sungguh luar biasa perkembangannya, tetapi disisi lain bagi masyarakat yang mengharapkan pemulihan ekonomi, ibarat menunggu godot yang tiada kunjung tiba. Terlepas dari persoalan kesejahteraan yang belum kunjung dinikmati oleh masyarakat pedesaan, tetapi pidato Presiden SBY selama 73 menit, salah satu masalah yang menarik adalah, upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pertanian. Pengungkapan persoalan pertanian yang menyita waktu sekitar kurang lebih lima menit, menunjukkan bahwa, sesungguhnya pemerintah memiliki kepedulian terhadap persoalan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang agraris.

### **A. Penguatan Basis Pertanian**

Mengupayakan kembali perlunya diperkuat basis pertanian, adalah langkah tepat bagi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Tetapi persoalannya, upaya merevitalisasi pertanian pasca reformasi kenegaraan harus dipilih program yang tepat dan sejalan dengan koridor demokratisasi politik di lingkungan petani pedesaan. Harus diakui, bahwa komunitas petani adalah basis sosial kultural dan politik dalam struktur masyarakat Indonesia. Mereka memiliki potensi besar sebagai sumber kekuatan politik yang dinamik, bahkan jika diorganisasikan dengan baik, bisa mempengaruhi jalannya kekuasaan dalam dinamika politik lokal maupun nasional. Namun demikian, meski petani mampu memberikan kontribusi besar dalam politik kekuasaan negara, tetapi

## Bab 11

# Exxon Mobil dan Pemuka Pendapat Lokal

Badan Musyawarah DPR RI akhirnya memutuskan, tetap melanjutkan proses pengusulan hak angket Blok Cepu dan akan membicarakan lebih lanjut masalah itu pada tanggal 23 Mei 2006. Disisi lain berbagai kelompok masyarakat juga masih terus mempersoalkan penunjukan ExxonMobil sebagai pengelola Blok Cepu. Namun sebaliknya, masyarakat setempat di Blok Cepu sepertinya tidak peduli terhadap pro dan kontra seputar perdebatan itu, mereka justru bersuka cita menyambut kehadiran ExxonMobil sebagai perusahaan yang diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada warga desa.

Masyarakat di sekitar Blok Cepu yang umumnya buruh tani boleh saja berandai – andai tentang kemelimpahruahan ekonomi jika ExxonMobil beroperasi, tetapi selayaknya jangan terburu nafsu, sebab banyak contoh faktual, bahwa beroperasinya perusahaan multinasional di wilayah pedesaan tidak secara signifikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Ramalan teori tetesan ke bawah yang sering dipakai sebagai acuan para perencana pembangunan seringkali justru meleset berbalik arah menjadi bentuk eksploitasi sumber alam yang dilakukan oleh pemilik modal yang menanamkan investasi di desa.

### A. Industri di Pedesaan dan Karakter Agraris

Sepertinya sudah merupakan kelaziman, jika kehadiran industri di pedesaan, “seperti halnya ExxonMobil di Blok Cepu”, pada awalnya disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat karena kesempatan untuk bekerja di perusahaan terbuka lebar, meski hanya mengandalkan tenaga saja. Namun sesuai dengan karakteristik kultural masyarakat pedesaan, mereka cenderung memosisikan bekerja di pabrik mirip dengan kegiatan sektor agraris yang bisa mengatur waktu sendiri dengan semangat kolektivitas. Tentu saja perilaku ini tidak sejalan dengan aturan perusahaan yang memiliki jadwal ketat dengan kejelasan tugas. Akibat ketidaksamaan budaya kerja tersebut, maka sebagian besar buruh pabrik masyarakat setempat lebih banyak yang memutuskan berhenti kerja dan memilih bekerja sektor informal di sekitar pabrik dengan penghasilan yang tetap rendah.

## Bab 12

# Rating TV dan Khalayak di Daerah

Dalam berbagai diskusi yang membicarakan tentang mutu siaran televisi, biasanya muncul pendapat yang menghendaki acara televisi yang bermutu dan bernilai positif bagi pendidikan masyarakat pada umumnya. Namun persoalannya, televisi jauh lebih mengunggulkan popularitas sebuah acara televisi dibandingkan dengan berupaya untuk memberikan tontonan yang dinilai bermuatan positif bagi pendidikan maupun pengetahuan khalayak.

Popularitas sebuah acara televisi yang ditonton oleh banyak orang, didasarkan kepada sistem rating kepemirsaaan. Orientasi sistem rating, merujuk kepada aspek kuantitatif sebagai patokan untuk mengukur tingkat popularitas sebuah acara televisi. Lembaga rating yang menjadi referensi pengelola televisi di Indonesia adalah AGB. Nielsen. Sebagai lembaga pemeringkat rating, selama ini tidak ada yang bisa menandingi. Karena itu seolah – olah AGB Nielsen adalah lembaga tunggal yang melakukan rating kepemirsaaan acara televisi. Implikasinya, para pengelola layar kaca lebih banyak tunduk terhadap rating AGB. Nielsen, dibandingkan dengan upaya untuk memberikan tontonan bermutu yang diasumsikan mampu menunjang kecerdasan bangsa dalam perspektif ideal. Para pekerja televisi, selalu cemas menunggu hasil rating AGB Nielsen yang secara rutin dikeluarkan setiap minggu bahkan setiap hari. Sesungguhnya kita tidak mempersoalkan tentang metodologi penetapan sampel ataupun proses akademis yang diterapkan oleh lembaga rating paling populer itu. Namun secara esensial, hasil kerja Nielsen adalah gambaran faktual tentang animo masyarakat terhadap jenis tayangan di sejumlah stasiun televisi.

Keunggulan lembaga rating yang menonjolkan kuantitas itu, memperoleh saingan dari kumpulan organisasi, yang terdiri terdiri dari Yayasan Sain, Estetika dan Teknologi (SET), TIFA dan beberapa lembaga independen lainnya, yang melakukan survei dengan menilai kualitas acara televisi (Kompas, 8 Juni 2008). Respondennya adalah orang – orang yang ditetapkan secara sengaja. Mereka dianggap tahu menilai secara kritis terhadap film yang bermutu, dan sejumlah atribut lain yang intinya menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok terpelajar.

Sejalan dengan pemeringkatan kualitas Yayasan SET dan kelompoknya, Kompas juga melakukan survei pemeringkatan acara televisi, yang hasilnya tidak jauh berbeda.

## Bab 13

# Komunikasi, Petani dan Perubahan Sosial

Komunikasi dalam konteks perubahan sosial di lingkungan petani, sering diposisikan sebagai faktor yang mendukung ide perubahan melalui penyebaran simbol – simbol untuk mempengaruhi masyarakat tradisional, agar mau menerima perubahan yang dikehendaki. Simbol – simbol yang digunakan dalam komunikasi menciptakan berbagai makna yang berbedadalam persepsi individual maupun kelompok yang berinteraksi. Barnlund (dalam Ruben, 1992 : 67 ) dengan singkat menyebutkan “komunikasi adalah membangkitkan makna”. Dalam pembahasan yang mengkaitkan pengertian komunikasi dengan penggunaan simbol dikemukakan oleh Erns Casserer (dalam Bower dan Bradac, 1982 : 3) yang menyebutkan, “*human communication is unique*”, komunikasi manusia adalah unik dan dalam prakteknya manusia merupakan satu – satunya makhluk yang menggunakan simbol – simbol dan penggunaan simbol ini sangat fundamental bagi kemanusiaan.

### A. Problem Komunikasi

Perhatian spesifik berkenaan penggunaan simbol dan pemberian makna dipaparkan oleh Weaver (dalam Shannon dan Weaver, 1972:4) yang mengemukakan tiga problem komunikasi dalam penggunaan simbol dan pemberian makna makna mencakup:

- (1). Bagaimana simbol – simbol komunikasi ditransmisikan (problem teknik);
- (2). Bagaimana ketepatan simbol – simbol yang sudah dikirimkan tersebut mampu membangkitkan makna yang dikehendaki (problem semantik);
- (3). Bagaimana efektivitas dari makna yang diterima dapat mempengaruhi hasrat dan tingkah laku (problem efektivitas).

Tidak semua komunikasi dikehendaki oleh pihak yang terlibat dalam interaksi seperti halnya mengurangi ketidak pastian, menambah pengetahuan dan keuntungan lainnya. Dapat saja komunikasi justru menimbulkan ketidakserasian seperti pendapat Hooker dan Wilmot (1978:20), “*communication is the central elements in all interpersonal conflict*”. Perilaku komunikasi kerap menciptakan konflik, perilaku komunikasi merefleksikan konflik; komunikasi merupakan sarana bagi konflik manajemen yang produktif maupun destruktif.

## Bab 14

# Ketimpangan Informasi dan Sosiokultural Petani

Menurut Roucek (1987 : 339) masyarakat adalah, " suatu kelompok manusia yang sedikit banyak mempunyai kesatuan yang tetap dan tersusun dalam aktifitas kolektif dan mereka merasakan bahwa mereka bersatu". Sedangkan masyarakat desa, adalah suatu bentuk persekutuan yang abadi antara manusia dan institusinya dalam suatu wilayah setempat, dimana mereka tinggal di rumah-rumah pertanian yang berserak dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama merek (Soerjano Soekanto, 1986 : 336). Pendapat tersebut menyiratkan bahwa masyarakat desa dan pertanian, mempunyai hubungan yang erat. Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat desa umumnya adalah petani, atau sebaliknya petani merupakan repenstatif dari sebuah masyarakat pedesaan.

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto (1981 : 119-122) yang menelaah tentang masyarakat pedesaan, pada intinya menyatakan, "masyarakat pedesaan (*Rural Community*) umumnya hidup dari pertanian, mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainya diluar wilayah batas sistem kehidupan berdasarkan kelompok atas sistem kekeluargaan.

### A. Kemiskinan dan Ketimpangan Informasi

Pada sisi lain yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi, kehidupan petani tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan yang kurang memadai. Walaupun tidak secara eksplisit menyebut sebagai petani kecil atau petani berlahan sempit; Rogers dan Svanning (1969 : 21-23) mengemukakan, " menelaah kehidupan petani selalu berhubungan dengan kemiskinan, ketimpangan, pendapatan, sikap dan perilaku dalam penerimaan perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, keterbatasan memperoleh informasi aktual dan ketergantungan terhadap kekuasaan negara lain". Intinya, petani adalah sosok yang memiliki ketergantungan dalam berbagai macam sendi kehidupan.

Sebenarnya petani, khususnya mereka yang mempunyai pekerjaan di sektor pertanian sawah padi, tidak selalu menghabiskan waktunya untuk mengurus sawah

## Bab 15

# Waktu Siklus Versus Budaya Komersial

Petani mempunyai tatanan sosial spesifik, pola komunikasi dan interaksi lebih diwarnai dan berorientasi mitos, legenda, dongeng serta pengaruh supernatural yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan, kesuburan tanah, keberuntungan dan faktor lain yang terdapat dalam lingkaran siklus hidup manusia. Budaya Timur memposisikan waktu sebagai Waktu Siklik, yang memandang bahwa waktu tidak linier, tidak tergantung kepada kepribadian seseorang, tetapi waktu sebagai siklik (berulang). Berbeda dengan Waktu Monokronik yang memandang bahwa pekerjaan harus dilakukan tepat pada waktunya. Mereka lebih menyukai jadwal yang tepat dan dan batas waktu yang sangat dihargai. Waktu monokronik sejalan dengan tuntutan dan penggunaan ideal teknologi, karena itu tidak bisa berkembang dengan maksimal di lingkungan budaya yang mengunggulkan waktu siklik atau siklus.

Petani pedesaan mempunyai kepercayaan terhadap waktu siklus, yang cenderung menguasai waktu diakronik, menafsirkan bahwa kesempatan akan datang berulang, sehingga tidak perlu menyelesaikan kegiatan dengan jawab kerja yang ketat. Karena itu, ketidakmampuan dalam penguasaan teknologi yang ada di pedesaan, selain disebabkan oleh faktor modal, dan bantuan pemerintah, juga disebabkan oleh karakteristik waktu diakronik yang sudah melekat di sebagian petani pedesaan. Pola pelembagaan waktu siklus di pedesaan, selain sudah mengakar di masyarakat, juga dukungan pemuka pendapat (*opinion leader*) sebagai pemegang otoritas yang menyangkut masalah sosial, ekonomi dan politik yang dipercaya.

Terlepas dari masalah penghargaan terhadap waktu, masyarakat desa pada umumnya, dan petani pada khususnya mempunyai karakter sosial universal seperti penghormatan terhadap pemuka agama, orang tua dan nilai - nilai sosial lain yang berakar kepada tradisi. Secara alamiah, jika tanpa campur tangan kekuasaan negara, komunitas petani pedesaan lebih percaya terhadap peran pemuka pendapat tradisional yang berakar kepada budaya setempat dan tumbuh di lingkungan yang memiliki persamaan nilai serta budaya.

Pemuka pendapat tradisional di lingkungan desa, adalah orang yang dipercaya memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh petani, kadang - kadang tidak

## Bab 16

# Lembaga Tradisional dan Legalitas Kekuasaan

Lembaga pertanian yang ada di pedesaan-pedesaan meliputi lembaga formal dikelola masyarakat dengan legalitas kekuasaan negara seperti kelompok-kelompok kerja pengaturan irigasi atau berbagai koperasi penyalur kredit untuk petani. Disamping itu terdapat institusi yang di bentuk karena aspirasi masyarakat setempat dalam wujud kelompok kerja yang tidak terorganisir seperti dalam pekerjaan pada musim tanam, musim panen dan lain-lain.

Eksistensi kelompok sosial di pedesaan sebenarnya cukup menonjol tetapi kenyataannya organisasi dibawah kontrol kekuasaan negara jauh lebih dikedepankan oleh birokrasi pemerintahan daerah. Sejalan dengan posisi organisasi tersebut, dalam penelaahan Uphoff dan Esmen (1974 : 12 ) menyatakan bahwa keefektifan organisasi-organisasi petani dalam mempengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan penduduk desa dipengaruhi oleh hubungan antara organisasi petani dengan lembaga-lembaga lain dari tingkat horizontal dan vertikal dengan struktur pemerintahan. Senada dengan pernyataan itu bahwa kemampuan organisasi petani dalam melaksanakan peranan pembangunan desa juga sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan strategi-strategi pemerintah ( Innayatullah, 1978 : 2 ).

### A. Upaya Mengontrol Petani

Keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan dan mengontrol petani melalui komunikasi politik yang serba mewajibkan, memaksakan kehendak dengan masif, dan membentuk lembaga-lembaga birokratis versi kekuasaan negara, berpotensi untuk membatasi masyarakat dalam menjalankan proses produksi yang berkembang secara alamiah dalam bingkai keserasian dengan lingkungan. Pada konteks ini, Etzioni (1985 : 160) menyatakan bahwa, kebutuhan masyarakat yang beragam sehingga didalam masyarakat yang totaliter sekalipun, semua interaksi dalam organisasi tidak mungkin dipadukan dalam satu pola karena masing-masing masyarakat mempunyai perbedaan sendiri. Model kepemimpinan organisasi di lingkungan petani yang ideal tentunya yang merujuk kepada faktor referensi.

Menurut French dan Raven (1998 : 47), sumber kekuasaan dalam organisasi meliputi : (1) Kekuasaan Paksaan (*Coercive Power*), dimana kekuasaan diperoleh

## Bab 17

# Industrialisasi dan Pembangunan Desa

**K**etika lahan pertanian yang subur digusur untuk pabrik atau simbol-simbol modernisasi lain seperti perumahan, lapangan olah-raga, tempat rekreasi, peternakan, perkebunan yang dikelola secara modern bahkan kuburan, pada umumnya pemilik modal atau pemerintah menjanjikan pada masyarakat setempat atau petani untuk bekerja di pabrik-pabrik atau di proyek-proyek tersebut.

Tetapi janji itu tidak terwujud sebab industri atau organisasi modern hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja, seperti lapangan Golf, peternakan, perikanan, tambak udang yang dikelola secara modern dengan luas hektaran-hektaran hanya membutuhkan beberapa tenaga kasar, sedangkan tenaga terampil sangat langka di pedesaan, padahal semula sebagai lahan pertanian subur mampu menampung ratusan buruh tani.

Sebagian menjadi kenyataan dengan menjadi pekerja marginal, tetapi ternyata mereka tidak mampu untuk bertahan lama bekerja dilingkungan pabrik dan kegiatan lain yang mempunyai jadwal kerja yang ketat. Kultur Petani tidak dapat dipaksa untuk berinteraksi dengan pola pembagian kerja pabrik yang demikian ketat, mereka akhirnya lebih memilih keluar untuk menjadi buruh bangunan. Pedagang asongan atau pekerjaan yang menunjang komunitas industri dan tetap miskin.

Petani, menurut Tadaro (1981 : 97), adalah komunitas yang tidak mampu bersaing dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan industri yang selalu dipakai sebagai simbol pembangunan ekonomi yang multi dimensial, mencakup semua sendi kehidupan di negara-negara sedang berkembang. Berdasarkan pendapat tersebut, industrialisasi dianggap sebagai simbol keberhasilan pembangunan Negara Dunia Ketiga walaupun persoalan distribusi semakin timpang.

Dalam persoalan ini penting untuk membandingkan dengan pendapat yang menyatakan kehidupan petani menjadi lebih buruk lagi karena petani di Indonesia senantiasa didominasi oleh kekuatan eksternal yang mempunyai kepentingan politik dan ekonomi dan rezim yang berkuasa, dan petani merupakan bagian dari masyarakat yang tersubordinasi atau sebagian masyarakat pinggiran yang terus-menerus didominasi oleh kekuasaan negara (Triyono, 1994 : 74 ). Kondisi yang merisaukan ini diakui pula

## Bab 18

# Pasang Surut Kehidupan Petani

**W**ilayah-wilayah pedesaan yang paling tidak, pernah memperoleh sebutan sebagai salah satu sentra pendukung produksi padi dan hasil-hasil bumi lainnya, pada kenyataannya sejalan dengan perkembangan kewilayahan, dapat berubah menjadi kawasan yang tidak produktif karena berbagai alasan, dari yang lazim terjadi karena ditinggal para petani, sawah ataupun tanah perkebunan sudah bukan lagi milik mereka, atau materi di bidang pertanian, khususnya sawah padi, tidak memberikan penghasilan yang memadai. Profil semacam ini menggejala di berbagai kawasan pertanian, walaupun tidak bersifat mutlak tetapi pesimisme sebagian komunitas petani menghadapi dinamika politik pertanian, adalah gambaran faktual, tentang kondisi petani pedesaan. Berbagai problema melilit petani desa, seperti kelangkaan pupuk, yang disinyalir subsidiya tidak tepat sasaran, sebab ” subsidi pupuk tidak diberikan secara langsung ke petani, tetapi dalam bentuk subsidi pembelian gas yang menjadi bahan baku pupuk di pabrik – pabrik pupuk. Komponen pupuk dan bibit merupakan pengeluaran yang cukup besar bagi petani. 25 – 30 % biaya produksi, dikeluarkan untuk budidaya padi. (Kompas, 25 Juli 2008).

Selain itu industri yang merambah pedesaan, juga menjadi masalah serius di lingkungan petani. Sebagai contoh, berdasarkan catatan Kompas (tanggal 26 Juli 2008), di Kabupaten Karawang Jawa Barat, 36 – 40 % lahan sawah, terutama yang dekat perkotaan, beralih kepemilikannya. Dari jumlah itu, 70 % tetap menjadi sawah, 30 % lainnya beralih fungsi. Di Kecamatan Cibuyaya, terdapat 150 hektar sawah dimiliki oleh orang Jakarta, artinya masyarakat setempat yang notabene petani hanya sebagai buruh tani yang memiliki keterbatasan penghasilan dan kesejahteraan jauh dari ukuran kesejahteraan yang memadai.

### A. Kepemilikan Tanah

Ikatan historis di lingkungan petani pedesaan, dapat dilihat dari pola kepemilikan tanah, dimana tanah merupakan bagian dari hidup yang tidak mudah dilepaskan, atau dijual kepada orang lain. Tetapi modernisasi dan industrialisasi, dengan segala atributnya, yang disebarkan oleh teknologi komunikasi, semakin melunturkan sikap-sikap terhadap kepemilikan tanah. Dalam penelitian di pedesaan pulau Jawa, Collier

## Bab 19

# Interaksi dan Komunikasi Pedesaan : Sebuah Laporan

### A. Pendahuluan

Komunitas Petani dengan pola interaksi dan komunikasinya yang spesifik, adalah salah satu karakter masyarakat Indonesia sebagai negara agraris, yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan. Bahkan petani dan pedesaan dalam skala global selalu mendominasi berbagai diskusi maupun tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara dunia ketiga. Kehidupan petani itu sendiri sangat jauh dari kesejahteraan yang diharapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Theodor Shanin (dalam Rogers dan Svenning, 1969 : 18) bahwa petani adalah mayoritas dari umat manusia dan sejumlah dari mereka adalah miskin. Sementara itu, Rogers dan Svenning (1969:20), menegaskan, bahwa, “petani adalah mereka yang mempunyai pekerjaan di sektor pertanian dan mengkomsumsi sebagian besar produksinya untuk kepentingan mereka sendiri”. Pada intinya mereka belum mampu untuk memperoleh kesejahteraan yang memadai.

Sejalan dengan pemikiran tersebut dalam berbagai persoalan yang menyangkut, interaksi dan komunikasi kehidupan sosial ekonomi petani di Indonesia, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar petani mempunyai taraf hidup yang rendah, karena tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer lainnya, kecuali pangan. Mereka tidak mampu bersaing dengan kelompok ataupun entitas yang bergerak ataupun berusaha dibidang industri, jasa, perdagangan dan usaha lainnya yang menjadi ikon dari perubahan sosial di pedesaan.

Kehidupan petani menjadi lebih buruk lagi karena petani di Indonesia senantiasa didominasi oleh kekuatan dari penguasa yang mempunyai kepentingan politik dan ekonomi. Hakikatnya petani merupakan masyarakat pinggiran yang secara terus-menerus dikendalikan oleh kekuasaan negara dalam hal pengaturan proses produksi, pemasaran bahkan pandangan politikpun wajib merujuk kepada hegemoni kekuatan politik yang memegang kendali dalam pemeritahan.

Meskipun kondisi itu tidak sesuai segi sosial budaya yang diyakini, tetapi petani tidak mampu untuk menolak kehendak kekuasaan. Dipihak lain kekuasaan negara berupaya sekuat tenaga untuk mengontrol petani dengan ketat, mengingat posisi

Meskipun demikian, akses untuk memperoleh informasi dari berbagai radio maupun televisi swasta dapat ditangkap dengan mudah. Mereka juga tidak mempersoalkan tentang pengorganisasian pesan yang dilakukan oleh kekuasaan negara terhadap stasiun radio dan televisi. Sebab media komunikasi tersebut hanya semata – mata untuk hiburan.

Media komunikasi lain, seperti surat kabar, mudah dijumpai pusat kecamatan Klari, tetapi sampai di desa – desa pedalaman dilingkungan petani, sulit untuk ditemukan orang yang membaca surat kabar. Kalaupun ada, mereka umumnya membaca surat kabar terbitan Jakarta “Pos Kota” yang sangat dikenal di kawasan Pantura, yang sesungguhnya sangat langka untuk menemukan berita terkait dengan masalah pertanian.

Sedangkan media tradisional, seperti sandiwara rakyat, wayang golek, silat dan grup kesenian tradisional lainnya memudar eksistensinya. Meski demikian jaipong yang dipadukan dengan musik dangdut justru berkembang pesat di lingkungan petani Klari. Dukungan peralatan audio visual yang memadai menghasilkan paduan antara jaipong, karaoke dan organ tunggal hampir selalu tampil dalam kegiatan sosial ataupun hajatan masyarakat petani di Klari.

## **H. Penutup**

Petani di Kecamatan Klari adalah gambaran petani sawah padi yang mempunyai kompleksitas kehidupan yang pasang surut. Keterbatasan dalam memperoleh informasi aktual dan dominasi pesan yang bersifat serba memaksa terhadap petani pedesaan, mengakibatkan kehidupan mereka semakin terpinggirkan. Terlebih lagi ketika dengan terpaksa harus berdampingan dengan pabrik-pabrik yang menyita lahan pertanian, maka petani Klaripun tidak mampu berbuat banyak untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Harmonisasi dalam pengelolaan sawah padi sebagai siklus alami di wilayah Klari, yang didalamnya lekat dengan unsur kepribadian dan kekuatan tradisi, tampak semakin pudar ketika simbol-simbol budaya pabrik yang dibawa oleh para pendatang lebih mendominasi. Kondisi ini secara langsung juga berimplikasi terhadap kekurangan buruh tani, karena orang Klari, terlebih lagi generasi muda, sengaja menjauh dari kehidupan bertani dan larut dalam dinamika pabrik. Secara esensial, anak-anak muda dan sejumlah keluarga petani lebih tertarik dengan pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan materi, seperti bekerja dipabrik ataupun sebagai pekerja serabutan yang mendukung perkembangan industrialisasi pedesaan.

Memang, tidak semua petani mengalami kondisi yang memprihatinkan, tetapi secara faktual jumlah mereka sangat terbatas, karena kesejahteraan hanya bisa dinikmati oleh petani komersial yang berlahan luas, yang lebih adaptif terhadap perubahan dan memiliki modal yang memadai untuk meningkatkan produktivitasnya.

## BIODATA PENULIS

**Dr. Eko Harry Susanto**, lahir di Pekalongan, 4 April 1958. Menyelesaikan pendidikan, dari Sekolah Dasar Negeri, sampai SMA Negeri di Pekalongan tahun 1975. Sempat selama satu pekan masuk di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan pada tahun yang sama, memutuskan untuk kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dengan minat besar terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat, maka skripsi yang ditulis berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan”, mengambil lokasi penelitian untuk tugas akhirnya di kawasan Pantai Utara Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan berhasil lulus tahun 1981. Mengawali mengajar di Perguruan Tinggi tahun 1982. Pada tahun 1984 bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan setelah menyelesaikan Program Doktor di Universitas Padjadjaran Bandung, melimpah sebagai dosen di lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta.

Saat ini Eko Harry Susanto, mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, maupun Program S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi lain. Menulis di Jurnal Ilmiah, dan menuangkan pendapatnya lewat opini di Harian Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Media – Indonesia, Bisnis – Indonesia, Seputar Indonesia, Suara Karya, Jurnal Nasional dan Pikiran Rakyat Bandung. Kegiatan lainnya adalah aktif memberikan ceramah tentang Komunikasi Politik, Strategi Pencitraan, dan masalah lain yang terkait dengan Transparansi Komunikasi maupun Otonomi Daerah.

Tahun 1993 kuliah di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, dan selesai tahun 1996. Menulis Tesis tentang Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Agen Modernisasi : Kendala dan Faktor – Faktor Pendukung Dalam Hubungan Antar Etnik. Pada prinsipnya tesis tersebut mengupas tentang pola – pola hubungan dalam suatu kawasan yang plural dan heterogin dari segi etnisitas, di salah satu wilayah Pantai Utara Jawa Barat.

Karena ketertarikannya terhadap pola komunikasi di akar rumput, maka pada tahun 1998 melanjutkan kuliah pada Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, dan lulus pada bulan Januari 2004. Menulis disertasi tentang Kredibilitas Opinion Leader Pedesaan (Studi tentang Perubahan Peran Pemuka Pendapat di Desa – Desa Lokasi Industri). Dengan lokasi penelitian di salah satu Kabupaten di Jawa Barat, disertasi kualitatif yang ditulis itu, hakikatnya menelaah



Dr. Eko Harry Susanto, lahir dan menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas di Kota Pekalongan, tahun 1976 kuliah Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta selesai pada tahun 1981.

Menempuh pendidikan S2 di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Jakarta, dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996.

Karena ketertarikannya terhadap Bidang Komunikasi di akar rumput, pada tahun 1998 melanjutkan Kuliah di Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung, dan lulus pada bulan Januari 2004. Menulis disertasi tentang Kredibilitas Opinion Leader Pedesaan (Studi tentang Perubahan Peran Pemuka Pendapat di Desa - Desa Lokasi Industri) Penelitian dilakukan pada salah satu Kawasan Pantai Utara Jawa Barat.

Saat ini Eko Harry Susanto, mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara, juga pada Program S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi lain. Aktif menulis di Jurnal Ilmiah dan menuangkan pendapatnya lewat opini di Surat Kabar Nasional maupun Daerah. Kegiatan lain adalah memberikan ceramah tentang Komunikasi Politik, Strategi Pencitraan dan masalah lain yang terkait dengan Transparansi Komunikasi maupun Otonomi Daerah.